

Inovasi Kebijakan Pendidikan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Syaiful Huda*, Yogi Suprayogi Sugandi, Widya Setiabudi Sumadinata

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*hudasyaiful217@gmail.com

Abstract

In a country, the government has the responsibility to provide equitable and quality access to education for all its citizens. This involves policy and investment in the education sector, training teachers, developing relevant curricula, and building adequate educational infrastructure. The provision of education is a fundamental requirement for the reconstruction of a civilization. This is a basic service that every individual needs and a responsibility that must be carried out by the state. Therefore, education is the process of developing and imparting knowledge, skills, and values to individuals in order to improve their abilities and quality of life. Education does not only occur in the school environment but can also occur in the home, community, and surroundings. This study aims to explain and describe educational policy innovations in the Provincial Government of West Java by using policy innovation instruments to conduct analysis. The method used in this study is a descriptive qualitative approach with the determination of informants using purposive techniques and triangulation for data processing. The results of the analysis show that the concept of Jura Education is a policy innovation that has fulfilled three main instruments, namely regulatory instruments, economic and financial instruments, and soft instruments. However, as a pilot project, this policy innovation still encounters a number of challenges in its implementation, requiring development from the government and related actors.

Keywords: *Innovation; Education policy; Provincial government*

Abstrak

Dalam sebuah negara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warganya. Ini melibatkan kebijakan dan investasi dalam sektor pendidikan, pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang relevan, serta pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai. Penyelenggaraan pendidikan merupakan syarat mendasar bagi rekonstruksi suatu peradaban. Ini adalah layanan dasar yang dibutuhkan setiap individu dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh negara. Maka dari itu Pendidikan adalah proses pengembangan dan pemberian pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada individu dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup mereka. Pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat terjadi di rumah, komunitas, dan lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan inovasi kebijakan pendidikan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan instrument inovasi kebijakan untuk melakukan analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif deskriptif dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive serta triangulasi untuk pengolahan data. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa konsep Pendidikan Jura merupakan sebuah inovasi kebijakan yang telah memenuhi tiga instrumen utama yakni instrument regulasi; instrument ekonomi dan keuangan; serta instrumen lunak. Akan tetapi, sebagai sebuah pilot project inovasi kebijakan ini masih menemui sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya sehingga memerlukan pengembangan dari pemerintah dan aktor-aktor terkait.

Kata Kunci: *Inovasi; Kebijakan Pendidikan; Pemerintah Provinsi*

Pendahuluan

Dalam sebuah negara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warganya. Ini melibatkan kebijakan dan investasi dalam sektor pendidikan, pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang relevan, serta pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai. Penyelenggaraan pendidikan merupakan syarat mendasar bagi rekonstruksi suatu peradaban. Ini adalah layanan dasar yang dibutuhkan setiap individu dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan karakteristik bawaan mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kehidupan mereka secara progresif dari waktu ke waktu. Dimana Pendidikan merupakan satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan juga merata (Fitri, 2021). Pendidikan adalah proses pengembangan dan pemberian pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada individu dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup mereka. Pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat terjadi di rumah, komunitas, dan lingkungan sekitar.

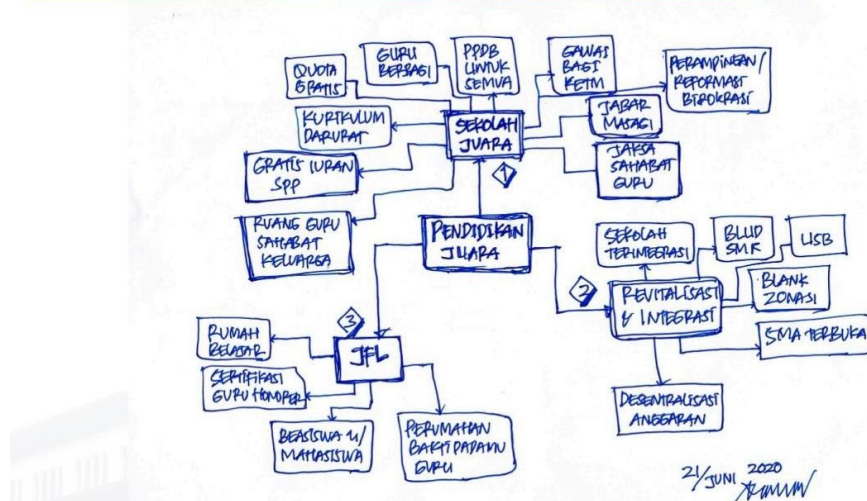
Selain itu menurut Lengkana & Sofa (2017) Pendidikan merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dijalankan jika salah satu subsistem tersebut memiliki permasalahan dan mengakibatkan tidak optimalnya peran setiap subsistem untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib membiayai dan menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu. Pada tatanan pengelolaan pendidikan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menerangkan terkait pembagian kewenangan tata kelola, di mana Pemerintah Provinsi diberi kewenangan untuk menjalankan pengelolaan pendidikan tingkat menengah. Faktanya ini tentu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Berbagai permasalahan terkait aspek-aspek penyelenggaraan pendidikan menjadi suatu tantangan tersendiri yang harus dipecahkan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu tuntutan peran peserta didik diharapkan mampu membawa perubahan positif di tengah situasi melalui pemahaman yang diberikan oleh pengajar (Ansori & Sari, 2020).

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Jawa Barat yang memiliki tanggung jawab secara teknis dan administratif dalam penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2017. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Jawa Barat melaksanakan tugas pokok yang meliputi pembinaan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus serta guru dan tenaga kependidikan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Secara khusus, Dinas Pendidikan berperan dalam dinamika pembangunan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan dengan mengacu pada RPJMD 2018-2023 yang memiliki target sasaran berupa peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan melalui strategi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi semua. Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki skor indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 73,12 poin (BPS, 2023). Angka IPM tersebut merupakan tolak ukur kinerja pembangunan yang dibentuk melalui 3 (tiga) dimensi yaitu pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Kontribusi dimensi pendidikan dalam peningkatan IPM sendiri dapat terlihat dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Pendidikan merupakan hal fundamental dalam pembangunan karena berkaitan dengan ukuran kondisi kualitas SDM suatu bangsa.

- Di Provinsi Jawa Barat sendiri, masih banyak masalah pendidikan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Dinas Pendidikan Jawa Barat kemudian merumuskan sejumlah isu strategis yang diantaranya adalah kesekretariatan; pendidikan pembinaan SMA, pendidikan dan pembinaan SMK, serta pendidikan khusus dan GTK. Secara garis besar, keempat isu strategis tersebut Adanya isu-isu tersebut pada dasarnya berangkat dari kondisi yang terjadi saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Adapun gambaran umum fenomena ini dapat terlihat dari beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Masih banyak ditemui kesenjangan peserta didik dalam pelaksanaan sekolah gratis;
 2. Masih terdapat keluhan dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Dari total 627 kecamatan di Provinsi Jawa Barat, masih terdapat 12 kecamatan yang belum mempunyai SMA dan SMK;
 4. Lulusan SMK yang diharapkan membuka dunia usaha baru justru menjadi penyumbang tertinggi pengangguran yakni sebanyak 14,5 %;
 5. Belum terpenuhinya unit sekolah baru;
 6. Belum dapat mengintegrasikan (Satu Atap) SMP-SMA yang diwujudkan 1 sekolah di 27 Kab/Kota Jawa Barat;
 7. Belum terealisasinya Pendidikan karakter Jabar Masagi;
 8. Belum dapat meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2019 dari 8,37 tahun menjadi 9,78 tahun sebagaimana target RPJMD;
 9. Belum tercapainya Harapan Lama Sekolah (HLS) selama 12,48 tahun.

Setelah melakukan analisis gap antara harapan dan kenyataan, Dinas Pendidikan Jawa Barat sebagai perangkat daerah yang mengurus urusan pemerintahan di bidang pendidikan kemudian meluncurkan sebuah inovasi kebijakan terkait pendidikan karakter berbasis agama dan budaya Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan nama “Pendidikan Juara”. Yang mana menurut Koch dalam (Sangkala, 2014) menyatakan bahwa Inovasi adalah persoalan penggunaan hasil pembelajaran yaitu penggunaan kompetensi anda sebagai dasar penemuan cara baru dalam melakukan sesuatu yang memperbaiki kualitas dan efisiensi layanan yang disediakan. Selain itu Inovasi adalah proses kebaruan dalam segala bidang pembangunan suatu bangsa. Inovasi merupakan pengembangan pengetahuan untuk menciptakan atau memperbaiki proses atau sistem yang baru secara signifikan (Chehade et al., 2020).

Konsep Pendidikan Juara



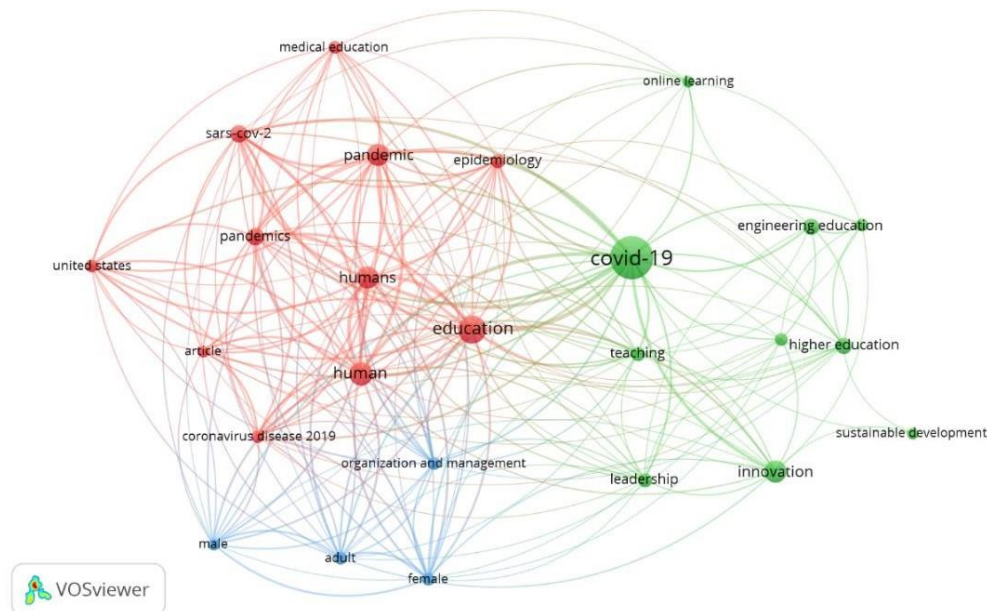
Gambar 1. Konsep Pendidikan Juara Pemerintah Provinsi Jawa Barat
 Sumber : Data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Jabar Pendidikan Juara merupakan salah satu inisiatif yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu, dan akses pendidikan di Jawa Barat. Secara garis besar, inovasi “Pendidikan Juara” ini memiliki 3 (tiga) cabang program unggulan yaitu “Sekolah Juara”, “Revitalisasi dan Integrasi Sekolah”, serta “Jabar Future Leaders (JFL)” (Yogaalkambah, 2022). Ketiga program ini kemudian diturunkan dalam beberapa subprogram yang pada akhirnya diarahkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang baik, serta melahirkan generasi muda Jawa Barat yang berkualitas dan berdaya saing.

Penelitian yang dilakukan oleh Suyono (2015) menyatakan bahwa inovasi kebijakan pendidikan di Kota Palopo diketahui dengan menggunakan 3 dimensi yaitu level inovasi, jenis inovasi dan tipe inovasi. Level inovasi dapat dilihat dengan melihat beberapa indikator yaitu dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat, kesetaraan *gender* dan pengecualian sosial, serta inovasi kebijakan dalam konteks lokal dan dapat ditransfer. Sedangkan untuk jenis inovasi terbagi menjadi *incremental innovation to radical innovation, top down innovation to bottom-up innovation dan need led innovations and efficiency-led innovation*. Untuk tipe inovasi terbagi enam yaitu layanan baru atau layanan yang diperbaiki, inovasi proses, inovasi administratif, inovasi sistem, inovasi konseptual dan perubahan radikal. Gambaran akan level inovasi pada kebijakan pendidikan di Kota Palopo belum dapat memenuhi semua indikator yang ada yaitu pada indikator dampak. Sedangkan untuk jenis inovasi yaitu *needs led innovation and efficiency-led innovation* dikarenakan pada tipe inovasi hanya ditemukan empat tipe yaitu layanan baru atau layanan yang diperbaiki, inovasi proses, inovasi administrasi, dan inovasi konseptual. Sehingga dunia pendidikan memerlukan inovasi untuk terus berkembang dan dapat mengikuti perkembangan bidang lainnya. Inovasi dalam dunia pendidikan harus terus menerus dan terus meningkat pada level yang lebih baik (Ambarwati, Wibowo, Arsyiadanti, & Susanti, 2021). Maka dari itu tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan dan mendeskripsikan inovasi kebijakan pendidikan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan instrument inovasi kebijakan untuk melakukan analisis.

Metode

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Creswell & Creswell, 2017). Dalam tahapan penelitian ini penentuan informan menggunakan teknik purposive yang berkaitan dengan inovasi kebijakan pendidikan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya dilakukan triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan data-data yang didapat dan berasal dari sumber atau informan dalam penelitian ini (Ritchie, Lewis, Nicholls, & Ormston, 2013). Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa lokasi yang utamanya adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan akan didukung dengan data dan informasi yang akan diteliti di Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat dan Perwakilan dari Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat. Untuk memperkuat penelitian ini, penulis perlu melakukan literature review terlebih dahulu, sehingga ini menjadi kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan kebaruan (novelty) dalam penelitian ini. Adapun penulis akan menampilkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi vosviewer dan diteruskan dengan penjelasan hasil literature review, Hasil pemetaan data dengan kata kunci “Education Policy Innovation dan Covid-19” menggunakan database Scopus dihasilkan sebanyak 121 karya ilmiah, berikut gambar hasil pemetaan vosviewer:



Gambar 2. Pemetaan VOSviewer Inovasi Kebijakan Pendidikan
 Sumber: (Scopus, 2022; VOSviewer, 2022)

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil studi literatur, dalam penelitian ini membahas pada organisasi publik yang mana instrumen inovasi kebijakan digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi proses inovasi. Menurut (Sudrajat, Mansyur, & Zakiyah, 2020) dalam bidang pendidikan, inovasi biasanya muncul dari adanya keresahan pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, (Borrás & Edquist, 2013) berpendapat bahwa instrumen dalam inovasi kebijakan harus dirancang dengan hati-hati dan berdasarkan sudut pandang sistem inovasi sehingga dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang kompleks dari proses inovasi. Pemilihan instrumen merupakan sebuah keputusan krusial dalam merumuskan suatu inovasi kebijakan. Meskipun instrumen inovasi kebijakan tidak dimaksudkan dan tidak dapat pula memengaruhi secara langsung tujuan akhir kebijakan, namun pemilihan instrumen ini tetap harus dilakukan terkait dengan permasalahan aktual yang teridentifikasi dalam sistem inovasi. Hal ini dikarenakan instrumen inovasi kebijakan hanya dapat memengaruhi proses inovasi yang menyiratkan bahwa tujuan akhir kebijakan harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam masalah konkret yang berkaitan dengan intensitas inovasi. Proses inovasi pendidikan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan adanya inovasi dan menerapkan inovasi pendidikan tersebut (Syafaruddin, Asrul, Mesiono, 2012).

Secara umum, Borrás & Edquist (2013) mengklasifikasikan instrumen inovasi kebijakan dalam 3 (tiga) kategori besar sebagai berikut:

1. Instrumen regulasi

Instrumen ini menggunakan perangkat hukum untuk mengatur interaksi sosial dan pasar. Instrumen ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mendefinisikan pengaturan interaksi yang terjadi dalam masyarakat dan sektor ekonomi. Instrumen yang terdiri dari izin, aturan, atau standar yang penting akan suatu inovasi kebijakan mendapat dua pandangan. Pandangan pertama beranggapan bahwa instrumen regulasi bersifat rumit dan dapat menghambat tumbuhnya inovasi. Sedangkan pandangan lain beranggapan sebaliknya dan menyatakan bahwa instrumen regulasi ini justru dapat meningkatkan penyebaran inovasi secara lebih jelas.

2. Instrumen ekonomi dan keuangan

Pada pandangan tradisional, instrumen ini berbicara tentang transfer ekonomi yang memanfaatkannya secara ekstensif. Namun dalam sudut pandang yang lebih luas, instrumen ini melibatkan sarana ekonomi baik dalam bentuk uang atau barang yang didasarkan pada pemberian insentif positif (mendorong dan/atau mempromosikan) atau disinsentif (mencegah dan/atau menahan) kegiatan inovatif tertentu. Dalam proses ini, pendekatan dari sisi penawaran dan penerimaan kerap menjadi masalah. Berdasarkan pengamatan signifikan, sebagian besar instrumen ekonomi yang ada lebih banyak memengaruhi perkembangan dan difusi inovasi dari sisi penawaran dibanding sisi permintaan. Padahal instrumen ekonomi yang berfokus pada permintaan dapat memacu dan meningkatkan penyerapan inovasi kebijakan yang dibuat (Edquist, 2015).

3. Instrumen lunak

Karakteristik instrumen ini dicirikan dengan sifat sukarela dan tidak memaksa. Instrumen ini menawarkan rekomendasi, membuat peraturan normatif banding, serta perjanjian sukarela atau kontrak. Instrumen ini bersifat variatif, namun umumnya pemilihan jenis instrumen lunak didasarkan pada pertukaran informasi dan bentuk kerja sama hirarkis antar aktor berkepentingan. Contoh dari instrumen ini sendiri diantaranya seperti standar teknis; kode etik; kontrak kerja; kampanye; dan lain sebagainya.

Meskipun terkadang instrumen inovasi kebijakan dapat dipilih secara individual, namun biasanya instrumen ini digabungkan dalam bentuk bauran, yang menyiratkan bahwa pemilihan instrumen mempertimbangkan atau saling melengkapi satu sama lain. Istilah bauran instrumen kebijakan inovasi diartikan sebagai kombinasi spesifik dari instrumen kebijakan terkait inovasi yang saling berinteraksi baik secara eksplisit maupun implisit dalam memengaruhi intensitas inovasi (Borrás & Edquist, 2013). Namun pada beberapa kasus, instrumen ini juga mungkin diubah dan disesuaikan dengan masalah baru lalu kemudian digabungkan dengan instrumen lain untuk menjadi alternatif penyelesaian masalah. Inovasi kebijakan Pendidikan Juara yang diluncurkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat merupakan sebuah gagasan yang hadir dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Kebijakan yang dijalankan melalui 3 (tiga) program unggulan ini diturunkan ke dalam beberapa subprogram sebagai berikut:

1. Jabar Sekolah Juara

Jabar Sekolah Juara adalah salah satu program yang bertujuan untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program yang berfokus pada peningkatan mutu dan daya saing sekolah di Jawa Barat ini dinilai dapat menunjang pencapaian indikator kinerja utama pemerintah dari segi pengetahuan masyarakat yakni melalui Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Jawa Barat. Program ini kemudian diturunkan kembali ke dalam beberapa subprogram yang meliputi Jaksa Sahabat Guru; Jabar Masagi; Perampangan/ Reformasi Birokrasi; Gawai Bagi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM); PPDB untuk Semua; Guru Berbagi; Kuota Gratis; Kurikulum Darurat; Gratis Iuran SPP; serta Ruang Guru Sahabat Keluarga

2. Revitalisasi dan Integrasi Sekolah

Program kedua ini berhubungan dengan penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana infrastruktur sekolah. Program ini sendiri bertujuan untuk memperkuat sinergi atas berbagai jenjang pendidikan, serta mewujudkan pendidikan yang terintegrasi secara berkesinambungan. Terkait dengan hal ini, diperlukan adanya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Program Revitalisasi dan Integrasi Sekolah ini juga berbicara tentang bagaimana

caranya melakukan desentralisasi anggaran dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten. Di samping itu, program ini juga menyangkut revitalisasi dan integrasi kesiapan sumber daya manusia (SDM) produktif khususnya di kawasan-kawasan baru yang ada di Jawa Barat. Program ini kemudian diturunkan kembali ke dalam beberapa subprogram yang meliputi Sekolah Terintegrasi; Badan Layanan Umum (BLUD) SMK; Unit Sekolah Baru (USB); Blank Zonasi; SMA Terbuka; serta Desentralisasi Anggaran

3. Jabar Future Leaders

Terakhir, program ketiga yakni Jabar Future Leaders (JFL) berkaitan dengan penyediaan akses dan inovasi. Program ini sendiri bertujuan untuk menyiapkan generasi muda Jawa Barat sebagai calon pemimpin di masa depan yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. Program ini ini diharapkan dapat membekali para pemuda dengan berbagai kompetensi baik keterampilan maupun pengetahuan yang tentunya dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Program ini kemudian diturunkan kembali ke dalam beberapa subprogram yang meliputi Rumah Belajar; Sertifikasi Guru Honorar; Beasiswa Untuk Mahasiswa; serta Perumahan Bakti Padamu Guru.

Dimana dibawah ini merupakasn hasil dari analisis yaitu sebagai berikut ini :

1. Instrumen Regulasi

Instrumen regulasi merupakan perangkat hukum untuk mengatur interaksi dalam proses inovasi kebijakan. Instrumen regulasi ini juga menjadi pedoman baik dalam perumusan maupun pengimplementasian inovasi kebijakan (Borrás & Edquist, 2013). Dari sisi instrumen regulasi, konsep “Pendidikan Juara” yang digagas oleh Pemerintah Jawa Barat berangkat dari sejumlah peraturan terkait, mulai dari yang ada di tingkat pusat hingga daerah. Di samping itu, dinamika dalam bidang pendidikan di Jawa Barat juga tidak terlepas dari upaya pencapaian target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Meskipun sudah ditunjang oleh berbagai seperangkat peraturan yang melekat, akan tetapi nyatanya masih terdapat beberapa permasalahan mengenai instrumen regulasi ditemukan di lapangan. Beberapa regulasi yang dinilai kurang jelas atau bahkan terkesan masih setengah-setengah menjadi kendala tersendiri bagi implementasi kebijakan inovasi yang ada. Belum lagi, kurangnya kesiapan dari segi SDM dan aspek lainnya yang menunjang berjalannya suatu kebijakan dan regulasi terkait.

Ketua PGRI Jawa Barat menyatakan bahwa sebagai sebuah inovasi kebijakan, efektivitas konsep Pendidikan Juara ini masih belum dapat terukur sepenuhnya. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut masih bersifat pilot project sehingga diperlukan waktu yang lebih untuk dapat melihat bagaimana tingkat pencapaian tujuannya. Dalam implementasinya, bahkan masih terdapat pula beberapa subprogram yang belum dapat direalisasikan seutuhnya.

2. Instrumen Ekonomi dan Keuangan

Instrumen ekonomi dan keuangan mencakup berbagai alat yang digunakan dalam aktivitas ekonomi dan keuangan untuk mengelola risiko, mengalokasikan sumber daya, memfasilitasi perdagangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Instrumen ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan sumber daya material merupakan salah satu aspek penunjang penting yang perlu menjadi fokus pemerintah (Rifa'i, 2017). Instrumen keuangan ini berkaitan dengan transfer ekonomi yang dimanfaatkan secara ekstensif untuk kegiatan inovatif tertentu (Borrás & Edquist, 2013). Setiap tahunnya, lebih dari 60% anggaran untuk fungsi pendidikan yang berasal dari sekurang-kurangnya 20% APBN dialokasikan untuk transfer daerah (Kemendikbud, 2022). Angka ini terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan dan kenaikan

volume belanja negara di bidang pendidikan. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, Pemerintah melalui Dinas Pendidikan telah melakukan penyaluran dana sebesar 250 miliar yang dilimpahkan kepada setiap Kantor Cabang Dinas (KCD) untuk memberikan ruang fleksibilitas dalam menciptakan inovasi di tingkat cabang.

Meskipun demikian, namun rupanya konsep “Pendidikan Juara” yang digagas oleh Pemerintah Jawa Barat masih tidak sebanding dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh. Hal ini terlihat dari adanya kekurangan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang mencapai lebih dari setengah miliar rupiah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan dan Komis V DPRD Jawa Barat masih perlu menjalankan koordinasi untuk melakukan pengajuan kembali pada APBD perubahan kepada DPRD Jawa Barat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah seperti yang terjadi pada 2022 silam. Sehingga Instrumen ekonomi dan keuangan ini memiliki peran penting dalam membantu menggerakkan aktivitas ekonomi, mengalokasikan sumber daya, mengelola risiko, dan memberikan kesempatan investasi serta perlindungan keuangan.

3. Instrumen Lunak

Di samping dua instrumen sebelumnya, instrumen lunak menjadi hal yang tidak kalah penting menunjang jalannya sebuah inovasi kebijakan. Instrumen lunak merupakan instrumen normatif yang dicirikan dengan sifat sukarela dan tidak memaksa (Borrás & Edquist, 2013), serta didasarkan pada pertukaran informasi dan bentuk kerja sama hirarkis antar aktor berkepentingan. Dalam konsep “Pendidikan Juara” terdapat beberapa aspek yang dapat dilihat sebagai instrumen lunak inovasi kebijakan. Dukungan atas instrumen lunak ini kemudian tercermin dari outcome yang bisa dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

Dilihat dari APM dan APK yang terus meningkat setiap tahunnya, dapat dikatakan apabila sebenarnya Pemerintah Jawa Barat sudah cukup berhasil menangani masalah pendidikan ini. Karena hal itu Pendidikan sebagai bagian dari kehidupan harus ikut berubah apabila diinginkan pendidikan tetap memegang peran penting dalam perubahan itu (Maemunah, 2018). Selain itu, hal lain yang dirasa sudah bagus nampak aspek kepemimpinan dari para kepala instansi yang masih bisa terus ditingkatkan agar lebih baik lagi. Akan tetapi di beberapa sisi, Pemerintah Jawa Barat juga belum bisa memaksimalkan instrumen lunak ini untuk mendorong pencapaian hasil yang lebih baik. Hal ini dapat terlihat dari beberapa kasus yang ditemui, di mana masih banyak pihak penyelenggara bidang pendidikan seperti sekolah masih belum tahu dan paham tentang konsep “Pendidikan Juara” yang telah dikeluarkan sejak awal periode 2018 lalu. Masalah tersebut menunjukkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada pihak-pihak lain yang seharusnya terlibat dalam implementasi kebijakan. Kemudian masalah lainnya dapat dilihat dari partisipasi dan pelibatan masyarakat yang ditengarai oleh belum optimalnya komunikasi pemerintah tentang suatu inovasi kebijakan yang dibuat. Bahkan yang lebih parah, tidak jarang masalah ini hingga menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat seperti misalnya dalam rekonstruksi bangunan sekolah yang melibatkan tanah warga.

Pendidikan menjadi sarana untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang siap dengan tantangan zaman, sehingga pendidikan harus dapat mengakomodir perubahan zaman (Kadi & Awwaliyah, 2017). Sehingga pendidikan memang harus menciptakan kemampuan daya saing bangsa. Dapat dipastikan bahwa pengaruh pendidikan terhadap pengembangan karakter bangsa sangat signifikan, karena keluarga, sekolah dan berbagai lembaga sosial menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai, pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada anak bangsa sebagai tanggung jawab sosial, politik, psikologis dan budaya

Kesimpulan

Pada dasarnya, sebuah inovasi kebijakan hadir akibat masalah publik yang kian kompleks dan dinamis sehingga diperlukan pemecahan masalah yang lebih efektif dan efisien. Setelah merumuskan sejumlah isu strategis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan meluncurkan sebuah inovasi kebijakan terkait pendidikan karakter berbasis agama dan budaya Jawa Barat yang dikenal dengan nama “Pendidikan Juara”. Dari sisi instrumen regulasi, inovasi kebijakan ini didasarkan pada sejumlah peraturan terkait mulai dari yang ada di tingkat pusat hingga daerah. Meskipun demikian, namun masih terdapat beberapa permasalahan seperti ketidakjelasan regulasi, tidak adanya regulasi khusus mengenai inovasi kebijakan, serta kapabilitas sumber daya manusia dan aspek penunjang lainnya. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan hanya jajaran eksekutif, tapi juga legislatif untuk sama-sama bersinergi sehingga dapat mengurangi kebijakan yang tidak efektif dan kebijakan yang sering berganti seiring dengan pergantian pimpinan daerah atau pimpinan setingkat dinas. Kemudian dari sisi instrumen ekonomi dan keuangan, inovasi kebijakan Pendidikan Juara dinilai masih harus lebih memperhatikan beberapa hal krusial. Meskipun sudah ditunjang dengan dana yang besar, akan tetapi hal ini masih tidak sebanding dengan kebutuhan dan tingkat pengeluarannya. Di samping itu, adanya desentralisasi keuangan yang dilakukan kepada KCD juga menimbulkan kekhawatiran dalam pengelolaannya. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menjalankan koordinasi untuk melakukan pengajuan kembali pada APBD perubahan kepada DPRD Jawa Barat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah disertai dengan konsolidasi dan pengawasan yang berkualitas. Terakhir dari instrument lunak, pelaksanaan inovasi kebijakan di bidang pendidikan terlihat APM dan APK yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, pada kenyataannya pemerintah masih belum bisa memaksimalkan strategi komunikasi kebijakan sehingga tidak jarang ada pihak-pihak yang belum tahu dan paham tentang inovasi yang dikeluarkan. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya tindak lanjut dari kerjasama yang dilakukan untuk sama- sama membuat program atau kebijakan yang disusun bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mitra yang melakukan kerjasama.

Daftar Pustaka

- Ambarwati, D., Wibowo, U. B., Arsyiadanti, H., & Susanti, S. (2021). Studi Literatur: Peran Inovasi Pendidikan Pada Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 8(2), 173–184.
- Ansori, A., & Sari, A. F. (2020). Inovasi Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 1(2), 133–148.
- Borrás, S., & Edquist, C. (2013). The Choice Of Innovation Policy Instruments. *Technological Forecasting And Social Change*, 80(8), 1513–1522. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2013.03.002>
- Bps. (2023). Indeks Pembangunan Manusia 2020-2022. Retrieved From Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat Website: <https://jabar.bps.go.id/indicator/26/123/1/Indeks-Pembangunan-Manusia.html>
- Chehade, M. J., Yadav, L., Kopansky-Giles, D., Merolli, M., Palmer, E., Jayatilaka, A., & Slater, H. (2020). Innovations To Improve Access To Musculoskeletal Care. *Best Practice & Research Clinical Rheumatology*, 34(5), 101559.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Fitri, S. F. N. (2021). Problematika Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1617–1620.

- Kadi, T., & Awwaliyah, R. (2017). Inovasi Pendidikan: Upaya Penyelesaian Problematika Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 1(2).
- Kemendikbud. (2022). Urusan Pendidikan Juga Jadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah. Retrieved From Jendela Pendidikan Kebudayaan Website: <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/urusan-pendidikan-juga-jadi-tanggung-jawab-pemerintah-daerah>
- Lengkana, A. S., & Sofa, N. S. N. (2017). Kebijakan Pendidikan Jasmani Dalam Pendidikan. *Jurnal Olahraga*, 3(1), 1–12.
- Maemunah, M. (2018). *Kebijakan Pendidikan Pada Era Revolusi Industri 4.0*.
- Rifa'i, A. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan Umkm. *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1).
- Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C. M., & Ormston, R. (2013). *Qualitative Research Practice: A Guide For Social Science Students And Researchers*. Sage.
- Sangkala. (2014). *Innovative Governance : Konsep Dan Aplikasi*. Surabaya. Capiya Publishing.
- Sudrajat, T., Mansyur, A. S., & Zakiyah, Q. Y. (2020). Strategi Inovasi Kurikulum Pendidikan Islam: Konsepsi, Kebijakan, Dan Implementasinya. *Jurnal Progress: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas*, 8(2).
- Suyono, E. (2015). Inovasi Kebijakan Pendidikan Di Kota Palopo. *Pada Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Syafaruddin, Asrul, Mesiono, P. (2012). *Inovasi Pendidikan*. ((Issue 9)).
- Yogaalkambah. (2022). Inovasi Pendidikan Juara Disdik Jabar, Capai Misi Dengan Tiga Program Unggulan. Retrieved From Sumedangekspres.Com Website: <https://sumedang.jabarekspres.com/2022/09/11/inovasi-pendidikan-juara-disdik-jabar-capai-misi-dengan-tiga-program-unggulan/>